

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan Negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Setiap orang siapapun dia dan apapun jabatannya serta kedudukan sosial ekonomi termasuk di dalamnya seorang ayah ataupun ibu harus menjunjung tinggi dan menghormati harkat, martabat serta Hak Azasi Manusia yang ada dalam diri anak dan tidak berbuat sebaliknya dengan melanggar hak azasi mereka seperti melakukan kekerasan yang dapat menyebabkan terguncangnya jiwa anak.

Anak merupakan manusia paling lemah di antara para anggota keluarga yang lain. Pada umumnya anak sangat bergantung kepada orang dewasa anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih labil.

Pengertian anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan

bangsa yang memiliki peranan strategis dalam menentukan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan yang korbannya adalah anak. Pengertian korban dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga LNRI No. 95 Tahun 2004 “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fakta yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya kekerasan yang menimpa anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Seperti kasus yang menimpa Indah Novitasari yang berusia 3 tahun dan adiknya Lintar Saputra yang berusia 11 bulan yang dibakar oleh orang tuanya, yang akhirnya mengakibatkan Indah Novitasari meninggal dunia dan Lintar Saputra menderita luka bakar. Kasus Siti Ihtiatun Soleha yang berusia 8 tahun yang disetrika oleh ayah kandungnya sendiri. Hal ini sangat membuat prihatin berbagai pihak mengingat bahwa orang tua adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan pada anak tetapi faktanya banyak sekali orang tua yang lupa akan tanggung jawabnya untuk mendidik serta melindungi anak mereka. Menurut Seto Mulyadi penyebab utama kekerasan pada anak adalah adanya anggapan bahwa anak adalah mutlak milik orang tua dan buruknya kondisi ekonomi. Adapun

berbagai alasan orang tua melakukan tindakan kekerasan pada anaknya yaitu dalam rangka mendidik anak misal anak melakukan perbuatan yang di pandang negatif oleh orang tuanya agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Orang tua menginginkan agar anaknya melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku, misal pelaku merasa terganggu karena anaknya rewel, maka agar anaknya ini diam pelaku menjewer bahkan ada pula yang sampai dipukul. Ada juga karena faktor ekonomi dalam keluarga yaitu penghasilan orang tua yang minim ditambah beban hidup yang sangat berat akan sangat mudah sekali memicu emosi orang tua dan akan melampiaskan pada anaknya.¹

Seharusnya orang tua dalam mendidik anaknya tidak perlu menggunakan kekerasan dengan memberikan hukuman fisik hal ini tidak dibenarkan karena hukuman fisik yang berakibat pada kekerasan fisik akan menimbulkan akibat psikologi bagi anak tersebut. Akibat psikologi ada yang bersifat jangka pendek dan ada pula yang bersifat jangka panjang. Misalnya ketika orang tua bermasalah dan merasa marah , jengkel, sedih dan kecewa anak kadang menjadi sasarannya. Anak yang tidak bersalah disalahkan dengan alasan yang dicari-cari lalu anak akan merasa jengkel dan marah juga. Apabila kejadian seperti ini berulang-ulang terus, maka anak akan berkembang menjadi pribadi yang penakut, ragu-ragu dan mudah cemas. Hal ini bisa berakibat anak akan menaruh dendam pada orang tuanya dan juga akan berakibat hilangnya kepercayaan anak pada orang tuanya. Anak tidak lagi merasa aman didekat orang tuanya sendiri. Ketidakpercayaan ini bisa meluas pada orang lain dan menimbulkan sikap antisosial. Selain itu seorang

¹www.Google.com, Putrika P.R Gharini, "*Kekerasan pada Anak dan Efek Fisik serta Psikis*" diakses pada Tanggal 15 September 2007 , Makalah disampaikan Tanggal 13-19 September 2004

anak yang sering mendapat hukuman badan akan berkembang menjadi anak yang nakal dan berkemungkinan akan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi karena anak tidak mendapatkan perlindungan hukum dan HAM yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sebenarnya di dalam Deklarasi Universal Hak azasi Manusia Pasal 5 disebutkan bahwa “Tidak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Di dalam pasal 26 ayat 1 butir (a), (b) dan (c) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 juga disebutkan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Di dalam Pasal 304 Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP LNRI No. 127 Tahun 1958 disebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi hidup, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu. Dalam Pasal 307 Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946

tentang KUHP LNRI No. 127 Tahun 1958 ditegaskan bahwa apabila yang melakukan kejahatan adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidananya ditambah dengan sepertiga. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini belum banyak diketahui apalagi dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu kekerasan pada anak akan tetap berlanjut dan jumlahnya akan semakin meningkat mengingat situasi dan kondisi hidup sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak yang paling lemah dalam hal ini adalah anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini perlu mendapatkan rehabilitasi dengan cara pendampingan psikologi secara terprogram, sehingga anak tidak akan mengalami tekanan mental maupun beban kejiwaan yang sangat berat. Terjadinya trauma pada anak menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam kondisi seperti ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak memerlukan pendampingan secara psikologi. Pendampingan psikologi ini dimaksudkan bukan sekedar meringankan beban trauma korban saja tetapi harus ada solusi terbaik sesudahnya. Artinya ketika kondisi psikis korban sudah stabil maka korban harus dapat menentukan sikap, harus ada ketegasan dari korban, apakah akan kembali kepada orang yang sudah melakukan kekerasan atau akan memprosesnya secara hukum. Jangan sampai yang terjadi ketika kondisi psikis mereka sudah stabil, justru mereka dihadapkan pada sikap keragu-raguan.² Upaya rehabilitasi diharapkan tidak sekedar melakukan pendampingan psikologi, tetapi juga dilakukan semacam bimbingan

² Ariswari Nuraini, "*Pendampingan Psikologis Korban KDRT*", dalam *Kedaulatan Rakyat*, Minggu 12 agustus 2007

konseling dengan tujuan untuk mencari akar permasalahan dan juga sebab-sebab mengapa pelaku sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.³ Bertolak dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang “Upaya Rehabilitasi Psikologi bagi Anak korban Kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tuanya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja dampak psikologi bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang:

1. Dampak psikologi bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

³www.Google.com, Irwanto dosen Fak Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta, “Kekerasan pada Anak dan Hukuman”, diakses pada Tanggal 15 September 2007

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu hukum mengenai pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologis bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya serta dapat menambah wawasan yang luas mengenai hal tersebut.

2. Bagi Penulis.

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah dampak psikologi serta pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan orang tuanya.

3. Bagi Masyarakat.

Agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam hal upaya rehabilitasi dalam rangka pemulihan psikologi bagi anak yang mengalami kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan ini yang berjudul “ Upaya Rehabilitasi Psikologi Bagi Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Dalam skripsi Ratih Kumala Dewi yang berjudul “Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Anak” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan skripsi Robbin Mathesta yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Keluarga Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pernah ditulis tentang Anak. Letak kekhususan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dampak psikologi dan pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan.
2. Rehabilitasi adalah kewajiban untuk menyediakan pelayanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya yang mencukupi maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi, nama baik korban.
3. Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.
4. Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Korban dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga LNRI No. 95 Tahun 2004 adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga LNRI No. 95 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik,

seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

7. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung.

Dengan demikian yang dimaksud dengan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud untuk menyediakan pelayanan psikologi yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah dan atau ibu kandungnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dogmatik yaitu meneliti norma hukum positif tentang Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan abstraksi yang artinya memisahkan, mengelompokkan dengan tujuan untuk mengetahui dampak psikologi dan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dilakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Kemudian dilakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Dengan menggunakan proses berfikir secara

deduksi yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari norma hukum positif.

2. Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2).
- 2) Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Nusantara Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958.
- 3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1975.
- 4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979.
- 5) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997.
- 6) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002.
- 7) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004.

- 8) PP. No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, pendapat para sarjana hukum, praktisi hukum serta website sehingga diperoleh suatu pengetahuan tentang dampak psikologi serta pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Nara Sumber

Dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pekerja sosial dan pengasuh anak di Trauma Center (TC) dan staff LPA guna menunjang penelitian lapangan, serta dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan, pendapat-pendapat dari praktisi atau pemerhati anak yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

1). Bahan Hukum Primer:

- a. Diskripsi Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh nusantara, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan LNRI No. 12 Tahun 1975, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LNRI No. 32 Tahun 1979, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak LNRI No. 3 Tahun 1997, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga LNRI No. 95 Tahun 2004, PP. No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Anak Mempunyai Masalah LNRI No. 2 Tahun 1988. Deskripsi ini menyangkut tentang upaya rehabilitasi yang diberikan bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dengan kata lain perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilaksanakan melalui:

- a) upaya rehabilitasi; baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- b. Selanjutnya bahan hukum primer disistemasikan secara vertikal antara UUD 1945 dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 dengan menggunakan prinsip penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dan sistematisasi secara horizontal antara KUHP dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 dengan menggunakan prinsip penalaran non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
- c. Sehingga diperoleh azas hukum yaitu azas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus menyisihkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam menggunakan azas ini tingkatan kedua Perundang-undangan ini harus sama. Maka dari itu ditemukan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum apabila menyangkut permasalahan tentang anak maka Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002.
- d. Setelah ini dilakukan interpretasi hukum secara:
- a) Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
 - b) Interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum

c) Interpretasi teleologis yaitu setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis yang berhubungan dengan diundangkannya suatu norma hukum Dalam hal ini tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 antara lain:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak azasi manusia;
- b. bahwa agar anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

2).Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan materi yang diteliti, makalah, karya ilmiah, pendapat para sarjana hukum serta website maka diperoleh pengertian atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat sehingga

diperoleh suatu abstraksi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data tentang dampak psikologi dan pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Langkah terakhir yaitu membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi dan harmonisasi atau perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data tentang dampak psikologi dan pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Setelah ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 ke hal-hal yang khusus yaitu dampak psikologi dan pelaksanaan upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

H. Sistematisasi isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang:

A. Tinjauan Umum

- 1 Tinjauan tentang upaya rehabilitasi psikologi yang terdiri dari pengertian upaya rehabilitasi dan pengertian psikologi.
- 2 Tinjauan tentang anak korban kekerasan yang terdiri dari pengertian anak, hak-hak anak, pengertian korban, pengertian kekerasan.
- 3 Tinjauan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yang terdiri dari pengertian keluarga, pengertian orang tua, tanggung jawab orang tua.

B. Dampak Psikologi Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Pelaksanaan Rehabilitasi Psikologi Bagi Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.